

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah: 1) untuk menganalisis dan mengkritisi pengaturan keterwakilan perempuan di DPRD pada pemilihan umum legislatif dan 2) untuk menganalisis dan mengkritisi akibat hukum apabila keterwakilan perempuan di DPRD pada Pemilihan Umum legislatif tidak terpenuhi. Dengan tujuan tersebut maka masalah yang dibahas adalah: 1) Bagaimana pengaturan keterwakilan perempuan di DPRD pada Pemilihan Umum Legislatif dan 2) Bagaimana akibat hukum apabila keterwakilan perempuan di DPRD pada Pemilihan Umum legislatif tidak terpenuhi. Dengan permasalahan tersebut maka metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), Pendekatan Kasus (*Case Approach*) dan Pendekatan Historis (*Historical Approach*) Bahan hukum yang dikumpulkan adalah: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Analisis bahan hukum yang terkumpul dilakukan dengan cara menginventarisasi, mensistimatisasi, dan menginterpretasikan. Hasil dari penelitian menunjukkan: 1). Pengaturan keterwakilan perempuan di DPRD dalam pemilu legislatif di Indonesia diatur melalui berbagai kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam politik dan pengambilan keputusan antara lain: Kuota 30% Perempuan dalam Daftar Calon, Penempatan Strategis dalam Daftar Calon, Pengawasan dan Pemantauan oleh KPU, Implementasi di Tingkat Lokal. Secara keseluruhan, pengaturan keterwakilan perempuan dalam pemilu legislatif bertujuan untuk mendorong partisipasi perempuan secara lebih signifikan dalam proses pengambilan keputusan di tingkat daerah (DPRD) dan nasional. Meskipun ada tantangan, kebijakan kuota dan sistem penempatan strategis dalam daftar calon memberikan dorongan penting bagi keterlibatan perempuan di ranah politik. 2). Apabila keterwakilan perempuan pada pemilihan umum legislatif tidak terpenuhi, terdapat beberapa akibat hukum dan dampak yang mungkin timbul, baik secara hukum maupun sosial di antaranya: Pelanggaran terhadap hak konstitusi yaitu Hak Representasi dimana keterwakilan perempuan merupakan bagian dari hak asasi manusia dan hak konstitusi. Dampak terhadap kebijakan publik akibat kurangnya perspektif gender. Dampak sosial dan psikologis mengakibatkan keterpurukan kepercayaan publik karena kurangnya keterwakilan perempuan dapat mengakibatkan berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem politik dan lembaga legislatif. Hal ini dapat berdampak pada partisipasi politik masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, penting untuk terus mendorong kebijakan dan praktik yang mendukung keterwakilan perempuan agar keadilan dan kesetaraan gender dapat terwujud dalam sistem politik dan pemerintahan.

Kata Kunci: Pengaturan, Keterwakilan Perempuan, DPRD.

ABSTRACT

The objectives of this study are: 1) to analyze and criticize the regulation of women's representation in the DPRD in the legislative elections and 2) to analyze and criticize the legal consequences if women's representation in the DPRD in the legislative elections is not fulfilled. With these objectives, the problems discussed are: 1) How is the regulation of women's representation in the DPRD in the Legislative Elections and 2) What are the legal consequences if women's representation in the DPRD in the Legislative Elections is not fulfilled. With these problems, the research method used is normative legal research using a statute approach, conceptual approach, Case Approach and Historical Approach. The legal materials collected are: primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Analysis of the collected legal materials is carried out by inventorying, systematizing, and interpreting. The results of the study show: 1). The regulation of women's representation in the DPRD in legislative elections in Indonesia is regulated through various policies aimed at increasing women's participation in politics and decision-making, including: 30% Quota for Women in the Candidate List, Strategic Placement in the Candidate List, Supervision and Monitoring by the KPU, Implementation at the Local Level. Overall, the regulation of women's representation in legislative elections aims to encourage more significant women's participation in the decision-making process at the regional (DPRD) and national levels. Despite the challenges, the quota policy and strategic placement system in the candidate list provide an important boost for women's involvement in the political sphere. 2). If women's representation in legislative elections is not fulfilled, there are several legal consequences and impacts that may arise, both legally and socially, including: Violation of constitutional rights, namely the Right to Representation where women's representation is part of human rights and constitutional rights. Impact on public policy due to lack of gender perspective. Social and psychological impacts result in a decline in public trust because the lack of women's representation can result in reduced public trust in the political system and legislative institutions. This can have an impact on the political participation of society as a whole. Therefore, it is important to continue to promote policies and practices that support women's representation so that gender justice and equality can be realized in the political and government systems.

Keywords: *Regulation, Women's Representation, DPRD*